

BULETIN WAHANA KOMUNIKASI

Program MFP 99



DFID Department for International Development



KEHATI
INDONESIAN
BIODIVERSITY
FOUNDATION

April 7, 2009

Suasana workshop di hotel Santika. Peserta tengah memperhatikan presentasi dari Forest Policy Facilitator MFP.



Inisiatif Community Foundation dalam monitoring implementasi SVSK



Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat sistem politik dan ekonomi korup, yang mengangap sumberdaya hutan, sebagai sumber pendapatan yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.

Lebih dari 30 tahun terakhir, negara ini secara dramatis meningkatkan produksi hasil hutan dan hasil perkebunan yang ditanam di lahan yang sebelumnya berupa hutan. Selama rezim orde baru, Indonesia merupakan produsen utama kayu bulat, kayu gergaji, kayu lapis, pulp dan kertas. Upaya menekan laju deforestasi dan degradasi

hutan dan lahan, serta mengatasi illegal logging dan perdagangan kayu secara ilegal, Departemen Kehutanan RI telah mengembangkan instrumen terkait tata niaga kayu yang disebut Sistem Verifikasi Sahnya Kayu [SVSK] sebagai standar legal yang diatur oleh sistem perundangan di Indonesia.

Namun demikian berbagai peraturan "abu-abu" pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan di tingkat pemerintah pusat hingga daerah masih berlaku, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan/implementasi SVSK nantinya. Bagi parapihak di daerah umumnya, konsep SVSK masih asing seperti halnya konsep perdagangan

karbon (REDD). Hal ini menjadi tantangan bagi penerapan dan implementasi SVSK. Sebagai respon atas realitas yang dihadapi, Empat community foundation, yaitu Java Learning Center (Jawa), Sulawesi Community Foundation (Sulawesi), Samanta (Nusa Tenggara) dan Sumatera Sustainable Support (Sumatera), berinisiatif menyelenggarakan workshop untuk menyusun metodologi monitoring tata niaga kayu sekaligus perumusan strategi kerjasama dan rencana aksi yang diharapkan dapat berkontribusi mendorong terwujudnya tata kelola kehutanan lebih baik dan berkelanjutan, khususnya terkait tata niaga dan perdagangan kayu di Indonesia.



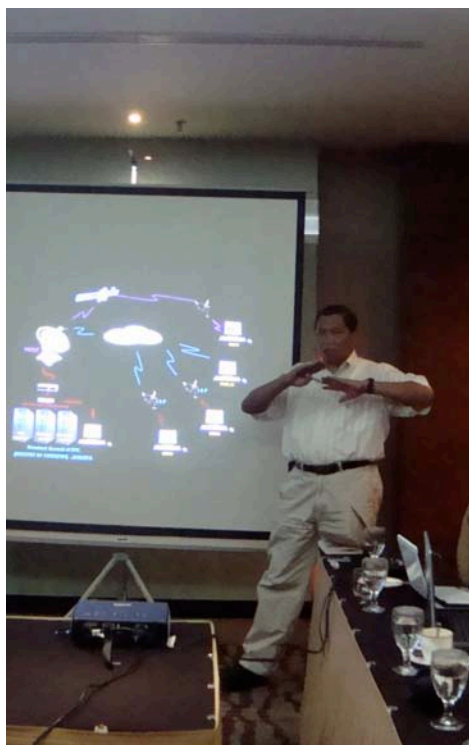
Komitmen CF Lintas Regio

Komitmen ke 4 community foundation tersebut, merupakan cermin kepedulian, tanggungjawab masyarakat sipil untuk terlibat dalam monitoring implementasi tata niaga dan perdagangan kayu. Kerjasama antar pulau yang dipelopori oleh CF ini sesungguhnya sangat strategis mengingat kerjasama antar pulau yang ditengarai memang menjadi jalur perdagangan kayu illegal.

Secara substansi, workshop ini ditujukan untuk :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan para pihak mengembangkan metodologi monitoring instrumen SVSK
2. Merumuskan kerangka metodologi monitoring perdagangan kayu maupun implementasi penerapan instrumen sistem verifikasi sahnya kayu [SVSK] lintas pulau di Indonesia
3. Merumuskan bentuk dan strategi kerjasama serta rencana aksi lintas pulau dalam menekan perdagangan kayu illegal di Indonesia.

Dalam diskusi hari terakhir, peserta membagi dua kelompok diskusi mendiskusikan strategi pelaksanaan dan kelembagaan pengelolaannya, sehingga rencana



Dr. Agus Setyarso dan peserta workshop aktif berdiskusi

diharapkan menjadi lebih operasional. Meskipun terhadang hambatan dana, beberapa inisiatif menjadikan gerakan ini sebagai pool resources tempat berkumpulnya fasilitator dan tenaga asesor ber-tifikat, menarik untuk dicermati, sebagai cara memperluas jaringan sambil mempersiapkan resources mobilisation atau membantu unit usaha di bawah CF. Javlec misalnya, berharap rencana ini akan bergulir dan diwadahi oleh sesuatu unit usaha yang mampu memberikan pelayanan profesional dalam memonitor tata niaga kayu dari tenaga profesional yang

mampu memberikan kontribusi financial bagi organisasi. Namun begitu secara umum, ke empat CF sepakat bahwa fungsi fasilitasi untuk mempromosikan keterlibatan lembaga civil society dalam memperluas jaringan, menguatkan LSM lokal yang berkiprah di ranah pemantauan tata niaga kayu tetap menjadi agenda utama. Terlepas dari kepentingan dan kebutuhan mengembangkan kelembagaan profesional dalam pengelolaannya, untuk cita-cita memantau implementasi SVSK di daerah dan antarpulau telah dimulai di Hotel Santika Jakarta.



Eko BW-Javlec, Tono SSS PUNDI dan Anton SCF serius mendengarkan presentasi narasumber

Saweran Workshop

Kepedulian Community Foundation untuk mendorong keterlibatan lebih luas jaringan civil society memantau pelaksanaan tataniaga kayu, yang secara langsung juga memonitor implementasi sistem TLAS/ SVLK ini patut di apresiasi. Mereka beriuur untuk dapat melaksanakan workshop di Hotel Santika Jakarta, 4-5 Maret 2009, dengan mengundang mitra-mitranya di masing-masing region, mengundang narasumber relevan

dan kompeten seperti Dr. Agus Setyarso, Nurcahyo Adi dari MFP II. Untuk menghemat, relawan dilibatkan menjadi Event Organizer CF juga membiayai mitra-mitra potensial mengembangkan jaringan pemantau tata niaga kayu di daerah. Selama 3 hari mereka merumuskan strategi dan langkah tindak lanjut yang secara kelembagaannya akan dikelola lebih dulu oleh CF disamping menjalankan fungsi fasilitasi pada jaringan kerja di daerah masing-masing.